Kondisi Umum Daerah

BAB II

Kabupaten Morowali terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Morowali terletak pada titik koordinat $121^0$02'24" – $123^0$15'36" Bujur Timur dan $01^0$31'12" – $03^0$46'48" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perairan Teluk Tolo dan Kabupaten Banggai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Selawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Luas wilayah Kabupaten Morowali adalah ± 45.453 km^2 yang terdiri atas wilayah daratan ± 15.490,12 km^2 dan wilayah perairan ± 29.962,88 km^2. Wilayah daratan Kabupaten Morowali merupakan yang terluas, yaitu 22,77 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Morowali terbagi kedalam 13 kecamatan dan 240

desa/kelurahan. Gambaran selengkapnya wilayah administrasi Kabupaten Morowali tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Morowali Menurut Kecamatan

Tahun 2004

Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase
Menui Kepulauan	223,63	1,44
Bungku Selatan	1.271,19	8,21
Bahodopi	1.080,98	6,98
Bungku Tengah	1.112,80	7,18
Bungku Barat	758,93	4,90
Bumi Raya	504,77	3,26
Witaponda	519,70	3,36
Lembo	1.332,84	8,60
Mori Atas	2.557,74	1.651
Petasia	1.635,24	10,56
Soyo Jaya	605,51	3,91
Bungku Utara	2.406,79	15,54
Mamosalato	1.480,00	9,55
Kabupaten Morowali	**15.490,12**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2004

2.1 Kondisi dan Analisis

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Topografi wilayah Kabupaten Morowali terdiri atas dataran tinggi yang tersebar pada kecamatan Lembo, Mori Atas, Petasia, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato meliputi sebanyak 27 desa. Dataran rendah tersebar pada 10 kecamatan, kecuali Kecamatan Menui Kepulauan, Bungku Selatan dan Soyo Jaya, sedangkan wilayah dengan topografi pantai tersebar pada 11 kecamatan, kecuali Kecamatan Lembo dan Mori Atas. Beberapa kecamatan juga memiliki topografi wilayah lembah/DAS yaitu Lembo (3 desa), Mori Atas (2 desa), Petasia (4 desa), Soyo Jaya (1 desa), dan Mamosalato (4 desa). Secara keseluruhan, Kabupaten Morowali memiliki topografi pantai yang meliputi 132 desa, lembah/DAS 14 desa, perbukitan 29 desa dan dataran 65 desa.

Kondisi geografi dan topografi ini berkaitan langsung dengan potensi pengembangan sektor-sektor ekonomi Kabupaten Morowali, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Untuk mendukung tujuan jangka panjang yang berkelanjutan, pemanfaatan sumberdaya alam bagi kepentingan ekonomi di Kabupaten Morowali harus tetap didukung dengan upaya pengelolaan konservasi lingkungan secara konsisten.

2.1.2 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Morowali menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Kabupaten Morowali berjumlah 162.529 jiwa dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 165.542 jiwa,

atau sebesar 1,85 persen kemudian pada tahun 2004 menjadi 166.477 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,56 persen. Pertumbuhan penduduk yang meningkat juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari luar ke wilayah Kabupaten Morowali, dengan alasan utama ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya daya tarik ekonomi Kabupaten Morowali dan prospek perkembangan di masa mendatang untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan data BPS tahun 2004 tingkat kepadatan penduduk per km^2 di Kabupaten Morowali masih sangat rendah. Pada tahun 2002 tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Morowali secara rata-rata baru mencapai 10 jiwa/km^2. Selama tiga tahun (2002-2004), tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Morowali secara rata-rata mencapai 11 jiwa/km^2. Tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah ini secara langsung berpengaruh terhadap skala ekonomi penyediaan berbagai layanan publik khususnya penyediaan infrastruktur penunjang aktifitas perekonomian. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan mempengaruhi kapasitas demand (permintaan) pada berbagai jenis bidang kegiatan yang dapat mencakupi pengembangan sektor primer (khususnya peningkatan produktifitas produksi), skala ekonomi penyediaan produk-produk dan jasa-jasa oleh sektor swasta. Kondisi ini menggambarkan bahwa potensi luas wilayah di Kabupaten Morowali masih dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang lebih besar.

Pada Tahun 2004, terdapat 4 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, masing-masing adalah Kecamatan Petasia 26.219 jiwa, Bungku Tengah 19.927 jiwa, Lembo 16.302 jiwa, dan Bungku Selatan 15.624jiwa.

Namun demikian dilihat dari segi kepadatan penduduknya terdapat perbedaan wilayah kecamatan. Kecamatan Menui Kepulauan dengan luas wilayah terkecil (223,63 km^2) memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar, yaitu 54 jiwa/km^2. Sebaliknya, Kecamatan Bungku Utara, Mori Atas, Bahodopi , Mamosalato yang memiliki wilayah cukup luas tingkat kepadatan penduduknya masih yang terendah, 5-6 jiwa/km^2.

Pada dasarnya, jumlah penduduk yang besar dapat merupakan keunggulan manakala kualitas sumberdaya penduduk juga tinggi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban ketika kualitasnya rendah. Beberapa variabel utama yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia pada suatu daerah antara lain tingkat pendidikan, ketrampilan, dan derajat kesehatan. Karena itu, kinerja dan masalah kependudukan yang perlu mendapat prioritas dapat dilihat dari komposisi tingkat pendidikan penduduk, keterampilan-keterampilan yang dimiliki, dan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi saat ini tentang kependudukan Kabupaten Morowali sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Morowali, Tahun 2004

Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk ($Jiwa/km^2$)
Menui Kepulauan	223,63	12.166	54
Bungku Selatan	1.271,19	15.624	12
Bahodopi	1.080,98	5.847	5
Bungku Tengah	1.112,80	19.927	18
Bungku Barat	758,93	7.789	10
Bumi Raya	504,77	10.213	20
Witaponda	519,70	14.215	27
Lembo	1.332,84	16.302	12
Mori Atas	2.557,75	14.906	6
Petasia	1.635,24	26.219	16
Soyo Jaya	605,51	6.219	10
Bungku Utara [a)]	2.406,79	10.928	5
Mamosalao [a)]	1.480,00	7.292	5
Kabupaten Morowali			
2004	15.490,12	166.477	11
2003	15.490,12	165.542	11
2002	15.490,12	162.529	10

Sumber : Data BPS Kab. Morowali, 2004

[a)] tidak termasuk suku terasing

Komposisi penduduk Kabupaten Morowali menurut jenis kelamin pada Tahun 2004 sejumlah 85.741jiwa laki-laki dan sejumlah 80.736 jiwa perempuan dengan *sex ratio* 106,20 sedangkan pada Tahun 2002 adalah 82.603 jiwa laki-laki dan 79.926jiwa perempuan, dengan *sex ratio* 103,35. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sekitar 103 orang. Kecenderungan nilai *sex ratio* ini dibandingkan Tahun 2002 dan 2004 menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2003 *sex ratio* penduduk laki-laki dan perempuan adalah 106,82, sedangkan pada Tahun 2004 *sex ratio*

sebesar 106,20. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk perempuan di Kabupaten Morowali menunjukkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk laki-laki. Nilai *sex ratio* pada dasarnya memberikan indikasi bagi pengambil keputusan dan kebijakan berkaitan dengan :

1. Penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi.
2. Peningkatan derajat kesehatan, melalui perbaikan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan derajat pendidikan, melalui perbaikan tingkat partisipasi sekolah dan aksebilitas terhadap pelayanan pendidikan.
4. Perumusan kebijakan-kebijakan khusus berbasis jender.

Gambaran kependudukan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali dapat dijelaskan dengan melihat penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Morowali. Pada Tahun 2004, total pencari kerja di Kabupaten Morowali berjumlah 2.769 orang, terdiri atas 1.395 laki-laki dan 1.374 perempuan. Kondisi Tahun 2004 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah pencari kerja dibandingkan dengan Tahun 2003 dan 2002. Pada tahun 2003 total pencari kerja di Kabupaten Morowali adalah 2730 orang, yang terdiri atas 1.421 laki-laki dan 1.309 perempuan, sedangkan tahun 2002 total pencari kerja di Kabupaten Morowali adalah 2.509 orang, terdiri atas 1.244 laki-laki dan 1.265 perempuan.

Data Tahun 2002 jumlah pencari kerja mencapai 2.509 orang dan pada Tahun 2003 meningkat menjadi 2.730 orang hal ini menunjukkan pada waktu yang akan datang penting diperhatikan menyangkut penyediaan lapangan kerja

bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2004, dimana dari jumlah pencari kerja yang dapat diserap hanya sebesar 20,14 persen atau sebanyak 557 orang. Melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi secara lebih optimal diharapkan semakin besar kesempatan kerja yang dapat disediakan bagi masyarakat, baik melalui keterkaitan kedepan *(forward linkage)* maupun keterkaitan kebelakang (*backward linkage*). Oleh karena itu, dalam jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Morowali diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi di Kabupaten Morowali. Hanya dengan investasi yang memadai pelaksanaan otonomi daerah akan mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya realisasi investasi, maka sulit diharapkan keberadaan daerah otonom akan mensejahterakan masyarakatnya.

2.1.3 Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Berdasarkan historisnya perekonomian Kabupaten Morowali selama lima tahun terakhir (2002-2004) masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi sektor pertanian dalam periode tersebut rata-rata pertahun mencapai 57,23 persen. Disamping sektor pertanian, perekonomian Kabupaten Morowali juga memiliki potensi pengembangan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran; jasa-jasa; dan industri pengolahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Morowali berbasis pada sumberdaya alam (*natural resources*). Pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya tersebut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dalam

jangka panjang, sehingga tidak hanya memberikan manfaat kepada generasi saat ini, tetapi juga menyediakan potensi pengembangan bagi generasi masa datang.

Deskripsi gambaran kondisi eksisting potensi sumberdaya alam dan permasalahannya di Kabupaten Morowali dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Potensi Pertambangan dan Energi*

  Sesuai dengan data geologi pertambangan, Kabupaten Morowali terindikasi memiliki potensi endapan bahan tambang galian berupa minyak bumi dan gas alam, nikel, chromit, dan marmer. Potensi pertambangan terbesar adalah tambang chromit seluas 32.123,01 Ha pada Kecamatan Bahodopi. Tambang minyak bumi dan gas alam terdapat di Bungku Utara dengan luasan mencapai 4,00 Ha. Sementara itu potensi marmer mencapai luasan sebesar 1.540,00 Ha tersebar pada Kecamatan Petasia, Lembo, dan Mori Atas.

  Agar keberadaan potensi pertambangan di Kabupaten Morowali dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pertambangan secara bijaksana, mengingat aktifitas ekonomi pertambangan terkait erat dengan wilayah-wilayah konflik pada berbagai kawasan hutan. Disamping itu, data potensi yang disebutkan di atas masih merupakan data indikasi yang dalam rencana pemanfaatan selanjutnya sangat bergantung ada kelayakan ekonominya. Karena itu, perlu dilakukan pemetaan geologi potensi pertambangan di Kabupaten Morowali agar informasi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan

menarik bagi para calon investor yang akan melakukan investasi pada bidang pertambangan.

Jika potensi tambang tersebut layak dan menguntungkan, maka pada masa mendatang aktifitas di bidang pertambangan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang cukup signifikan dalam jangka panjang.

- *Potensi Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan.*

Pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali masih bertumpu pada pembangunan di sektor pertanian dengan kontribusi utama sub-sektor perkebunan dan tanaman pangan. Pada Tahun 2003, kontribusi sub-sektor perkebunan dan tanaman pangan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Morowali berdasarkan harga konstan Tahun 2000 mencapai 12,54 persen tetapi ada Tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 12,42 persen. Meskipun mengalami penurunan sub-sektor perkebunan dan tanaman pangan memiliki masih tetap memiliki peranan stratejik dalam menyanggah perekonomian Kabupaten Morowali, baik dalam kaitan dengan penyediaan hasil produksi maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Permasalahan utama yang memerlukan perhatian pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan pengembangan strategi dan kebijakan jangka panjang adalah kecenderungan penurunan tanaman pangan dan kecenderungan peningkatan perkebunan. Kontribusi tanaman perkebunan terhadap pembentukan output Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun

terus mengalami kecenderungan peningkatan. Pada Tahun 2002 sebesar 29,72 persen, kemudian meningkat pada Tahun 2003 menjadi 31,14 persen. Peningkatan ini terutama bersumber dari hasil perkebunan besar untuk komoditas kelapa sawit dan karet, dan perkebunan rakyat untuk komoditas kakao, kelapa sawit, kelapa dan karet. Pada Tahun 2004, luasan tanaman perkebunan besar untuk kelapa sawit mencapai 16.507,27 Ha dengan jumlah produksi sebesar 158.085,61 ton dan tanaman karet mencapai luasan 3.123 Ha dengan jumlah produksi sebesar 2.896,63 ton. Disamping komoditas perkebunan tersebut, juga dikembangkan dalam bentuk perkebunan rakyat komoditas-komoditas lainnya yang memiliki prospek pengembangan cukup baik, yaitu cengkeh, kopi, pala, lada, vanili, dan karet.

Secara umum, daya tarik masyarakat dan sektor swasta untuk mengembangkan tanamam perkebunan terutama dipengaruhi oleh faktor mekanisme harga yang umumnya ditentukan atau mengacu kepada harga dunia, sehingga pelaku bisnis pada sub-sektor tanaman perkebunan ini (petani-pedagang pengumpul-eksportir) dapat melakukan perencanaan produksi dan pemasaran dengan lebih menarik terkait dengan margin keuntungan yang diharapkan.

Kondisi berbeda terlihat pada tanaman pangan. Kecenderungan kontribusi tanaman pangan terhadap pembentukan output Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2002, kontribusi sub-sektor tanaman pangan mencapai 9,69 persen, kemudian menurun pada Tahun 2003 dan 2004, masing-masing menjadi 9,05 persen dan 8,50 persen. Kecenderungan penurunan kontribusi sub-sektor tanaman

pangan terhadap pembentukan output Kabupaten Morowali perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Morowali secara khusus berkaitan dengan upaya pemerintah secara nasional untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Alternatif pengembangan tanaman pangan pada jangka panjang adalah mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk organik yang kecenderungan harganya terus mengalami kenaikan sehingga meningkatkan ongkos produksi.

Secara teknis dukungan pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Morowali terkait dengan ketersediaan sistem irigasi dan kualitas saprodi. Potensi luas areal daerah irigasi menurut jenis irigasinya di Kabupaten Morowali pada Tahun 2004 mencapai 17.162 Ha yang terdiri atas irigasi teknis (7.755 Ha), semi teknis (4.175 Ha), dan irigasi desa (5.223 Ha). Pada Tahun 2004, luas area terolah mencapai 8.439 Ha. Disamping itu, tingkat produktifitas tanaman padi yang diusahakan di Kabupaten Morowali masih relatif rendah. Pada tahun 2004 dengan luas panen 9.728 Ha diperoleh produksi sebesar 31.861,39 ton, atau produktifitas per Ha sebesar 3,27 ton. Kondisi ini menunjukkan peningkatan produktifitas dibandingkan dengan Tahun 2003, yatu sebesar 3,20 ton/Ha, dengan demikian sangat diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk lebih meningkatkan produktifitas tanaman padi melalui berbagai perbaikan sistem pengadaan dan kualitas input dan mekanisme penyerapan hasil produksi terutama pada saat panen raya, agar keberlangsungannya dalam jangka panjang dapat sejalan dan menunjang kebijakan nasional pemerintah untuk

menciptakan ketahanan pangan nasional, disamping untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan.

Sesuai dengan potensi alamnya, sub-sektor tanaman pangan yang juga memiliki prospek pengembangan jangka panjang di Kabupaten Morowali, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun antar daerah adalah tanaman palawija dan hortikultura, terutama kedelai dan cabe dan sayuran dataran tinggi yang potensi dan kontinuitas permintaannya cukup besar. Dalam jangka panjang, pengembangan tanaman pangan dan perkebunan perlu terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan pangan masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional, di samping untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan.

- *Potensi Sumberdaya Air*

Sumberdaya air di Kabupaten Morowali memiliki peranan stratejik dalam mempertahankan dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan sumberdaya air, khususnya air permukaan dapat digunakan untuk menunjang sistem pelayanan irigasi pertanian, sumber air bersih dan bahan baku untuk air minum. Oleh karena itu, keberadaan air permukaan ini harus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Morowali agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data geografis, terdapat 14 desa di Kabupaten Morowali yang berada pada daerah lembah/DAS. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang ada di sekitarnya,

sehingga keberadaan 14 desa ini sangat menentukan kapasitas DAS untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Morowali. Oleh karena itu, untuk kepentingan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Morowali perlu menetapkan pengaturan tentang pengelolaan DAS melalui penetapan peraturan daerah tentang garis sempadan sungai. Dengan adanya garis sempadan sungai ini, diharapkan konservasi lingkungan dan daya dukung DAS tetap dapat dipertahankan secara optimal dalam jangka panjang.

Di samping itu, untuk mempertahankan manfaat jangka panjangnya, maka Pemerintah Kabupaten Morowali perlu terus mengupayakan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kondisi konservasi lingkungan, khususnya pada wilayah yang merupakan daerah tangkapan air.

- *Potensi Sumberdaya Hutan*

Kabupaten Morowali memiliki potensi sumberdaya hutan yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat manakala pemanfaatannya dikelola dengan bijak, baik melalui pemanfaatan hasil-hasil hutan yang terdapat di kawasan hutan, maupun melalui konversi dan rehabilitasi kawasan hutan sesuai dengan norma peruntukannya. Pada Tahun 2004, total luas hutan di Kabupaten Morowali mencapai 1.564.612 Ha, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2003 yang luasnya mencapai 1.576.112 Ha.

Permasalahan sumberdaya hutan di Kabupaten Morowali dalam jangka panjang adalah kecenderungan berkurangnya luas kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam dan wisata, sedangkan untuk kawasan hutan

produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan areal penggunaan lain menunjukkan kecenderungan meningkat. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Morowali pada Tahun 2002 seluas 436.756 Ha yang bertahan sampai dengan Tahun 2003. Tetapi Tahun 2003 dan 2004 mengalami penurunan yang cukup besar. Pada Tahun 2003, luas kawasan hutan lindung berkurang menjadi 436.756 Ha, dan menurun tajam pada Tahun 2004 menjadi 430.756 Ha. Kondisi kawasan hutan suaka alam dan wisata tidak mengalami penurunan. Pada periode Tahun 2002-2004 luas kawasan hutan suaka alam dan wisata sebesar 241.331 Ha. Mengingat fungsi kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam dan wisata sebagai kawasan penyanggah, terutama sebagai habitat flora dan fauna khusus dan daerah tangkapan air, Pemerintah kabupaten Morowali perlu merumuskan strategi pemanfaatan kawasan hutan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Jika tidak dilakukan pencegahan pengendalian konversi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan suaka alam, maka terjadinya pendangkalan permukaan sungai di sepanjang DAS akibat sedimentasi yang tinggi, maka bencana banjir dan kekeringan merupakan masalah yang akan muncul pada waktu akan datang. Penataan wilayah kawasan hutan secara menyeluruh dan sistematis akan memberikan manfaat ekonomi yang optimal dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara bijak juga dapat dilihat dari kontribusi sub-sektor kehutanan yang selama periode Tahun 2002-2004 menunjukkan kecenderungan kenaikan. Pada

Tahun 2002, kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap pembentukan output Kabupaten Morowali mencapai 8,01 persen, kemudian menurun menjadi 7,83 persen pada Tahun 2003. Pada tahun2004, kontribusi sub-sektor kehutanan mengalami penurunan sebesar 6,79 persen.

Agar keberadaan hutan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang optimal, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kesadaran untuk tetap menjaga konservasi wilayah hutan lindung. Tabel 2.3 menggambarkan perkembangan luasan hutan di Kabupaten Morowali menurut fungsinya selama periode Tahun 2002-2004

Tabel 2.3

Luas Hutan Kabupaten Morowali menurut Fungsinya
Tahun 2002-2004 (Ha)

Fungsi Hutan	2002	2003	2004
Hutan Lindung	436.756	436.756	430.756
Hutan produksi biasa	181.366	181.366	181.366
Hutan produksi terbatas	238.177	238.177	238.177
Hutan suaka alam dan wisata	241.33	241.331	241.331
Hutan produksi yang dapat dikonversi	61.216	61.216	61.216
Penggunaan lain	417.266	417.266	411.766
Jumlah	**1.576.112**	**1.576.122**	**1.564.612**

Sumber: Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2004

- *Potensi Perikanan dan Peternakan*

Berdasarkan kondisi geografi dan topografinya, Kabupaten Morowali memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Dari total 13 kecamatan,

terdapat 11 kecamatan yang memiliki batas wilayah dengan pesisir/pantai, kecuali Kecamatan Lembo, Mori Atas yang merupakan wilayah perbukitan. Potensi perikanan ini tersebar pada 132 desa dari total 240 desa di Kabupaten Morowali. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan pengembangan suberdaya perikanan secara optimal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali akan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi (budidaya dan penangkapan) dan pemasaran.

Berkembangnya sub-sektor perikanan secara optimal akan memiliki dampak ganda (*multiplier effect*) yang cukup tinggi karena keterkaitan hulu (*backwar lingkage*) dan keterkaitan hilir (*forward linkage*) yang tinggi. Untuk perikanan budidaya, pada keterkaitan hulu akan terjadi peningkatan pemanfaatan air tawar, pembenihan, pakan ikan, tenaga kerja, pupuk, sarana dan prasarana wilayah (listrik, jalan, telekomunikasi), riset perikanan, dan tata ruang kawasan, sedangkan pada keterkaitan hilirnya akan berkembang (1) kegiatan pengolahan; (2) kegiatan pemasaran; dan (3) jasa dan hiburan.

Untuk perikanan tangkap, pada keterkaitan hulu akan berkembang pemanfaatan kapal, BBM, makanan dan es, tenaga kerja, *doking* dan *shipyard,* sarana dan prasarana wilayah (listrik, jalan, telekomunikasi), riset perikanan, tata ruang kawasan dan pelabuhan perikanan. Sedangkan pada keterkaitan hilirnya akan berkembang (1) kegiatan pengolahan; (2) kegiatan pemasaran; dan (3) jasa dan hiburan.

Kontribusi sub-sektor perikanan terhadap pembentukan output Kabupaten Morowali relatif konstan selam periode 2002-2004. Pada Tahun 2002 mencapai 9,56 persen, meningkat pada Tahun 2003, menjadi sebesar 9,72 persen. Tetapi pada Tahun 2004, mengalami penurunan menjadi sebesar 9,70 persen. Dengan melakukan strategi dan kebijakan pengembangan sub-sektor perikanan secara terpadu diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penggerak ekonomi Kabupaten Morowali.

Pengembangan potensi sumberdaya ternak di Kabupaten Morowali memiliki prospek yang cukup baik. Populasi ternak besar dan ternak kecil relatif cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat maupun untuk keperluan perdagangan antar daerah. Populasi ternak besar di Kabupaten Morowali meliputi sapi, kerbau, kambing, dan babi, sedangkan populasi ternak kecil meliputi ayam kampung, ayam potong, dan bebek.

Pada Tahun 2004, jumlah populasi ternak sapi berjumlah 16.949 ekor, mengalami peninkatan yang signifikan dibanding Tahun 2003 yang berjumlah hanya 7.024 ekor. Populasi ternak kerbau, pada Tahun 2004 berjumlah 837 ekor, menurun drastis jika dibandingkan dengan Tahun 2003 yang mencapai 779 ekor, sedangkan untuk populasi ternak kambing mengalami penurunan. Pada Tahun 2004, jumlah populasi ternak kambing sebanyak 4.536 ekor, menurun dibandingkan dengan populasi Tahun 2003 sebanyak 4.852 ekor. Untuk ternak babi, populasinya di Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun

2004 populasi ternak babi mencapai 23.156 ekor, meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2003 sebanyak 8.908 ekor.

Untuk ternak kecil, populasi terbesar adalah ayam kampung dan bebek. Pada Tahun 2004, jumlah populasi ternak ayam kampung mencapai 176.843 ekor, meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2003 yang berjumlah 176.065 ekor. Sedangkan ternak itik populasinya pada tahun 2004 berjumlah 6.059 ekor, menurun jika dibandingkan dengan kondisi Tahun 2003 sebanyak 10.912 ekor.

- *Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi*

Produk Domestik Regional Bruto (RDRB) sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerja ekonomi dapat digunakan untuk melihat kondisi kinerja perkonomian Kabupaten Morowali. Berdasarkan data pada Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa basis perekonomian Kabupaten Morowali masih bertumbuh pada kinerja sektor pertanian, dengan sub-sektor perkebunan dan tanaman pangan sebagai penggerak utama.

Kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali selama periode Tahun 2002-2004 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2002, Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) sebesar Rp 823.422.000.000,- kemudian meningkat pada Tahun 2003 dan 2004 masing-masing menjadi sebesar Rp. 884.329.000.000,- dan Rp. 948.546.000.000,-. Pertumbuhan kinerja perekonomian Kabupaten Morowali selama periode Tahun 2002-2004 digerakkan oleh sektor pertanian yang kontribusinya terhadap pembentukan Produk Domestik

Regional Bruto Kabupaten Morowali terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2002, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Morowali sebesar Rp 488.843.000.000,- (59,37 persen). Pada Tahun 2003 dan 2004 menjadi sebesar Rp 530.299.000.000,- (59,97 persen) dan Rp 569.550.000.000,- (60,04 persen).

Gambaran kinerja ekonomi Kabupaten Morowali dan kontribusi masing-masing sektor selama periode Tahun 2002-2004 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4, Tabel 2.5, dan Tabel 2.6.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Morowali
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2002-2004 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004
1. Pertanian	488.843	530.299	569.550
1.1.Tanaman Bahan Makanan	79.779	80.005	80.626
1.2.Tanaman Perkebunan	224.680	275.360	303.361
1.3. Peternakan	19.735	19.736	19.746
1.4. Kehutanan	65.923	69.225	73.848
1.5. Perikanan	78.726	85.973	91.968
2. Penggalian	4.287	4.553	4.882
3. Industri	34.504	36.316	38.813
3.1. Makanan, Minum dan Tembakau	7.700	8.114	8.694
3.2. Tekstil, Brg dari Kulit dan Alas Kaki	171	179	183
3.3. Kayu dan hasil hutan lainnya	24.783	26.033	27.840
3.4. Kertas dan Barang Cetakan	398	419	441
3.5. Pupuk Kimia dan Brg dari karet	16	16	17
3.6. Semen & Barang Galian bukan Logam	1.369	1.434	1.509
3.7. Alat angkutan, Mesin dan Peralatannya	94	102	108
3.8. Barang lainnya	18	19	21
4. Listrik dan Air Bersih	3.667	3.992	4.343
4.1. Listrik	3.259	3.548	3.856
4.2. Air Bersih	408	445	486
5. Bangunan	28.427	30.166	32.707
6. Perdaganan, Hotel dan Restoran	119.031	128.363	139.532
6.1. Perdagangan Besar & eceran	113.192	122.064	132.610
6.2. Hotel	831	881	951

6.3. Restoran	5.008	5.435	5.971
7. Angkutan dan Komunikasi	8.684	9.055	9.492
7.1. Angkutan	8.254	8.598	8.994
7.1.1. Angkutan Jl. Raya	2.476	2.574	2.677
7.1.2. Angkutan Laut	654	684	715
7.1.3. Angk. Udara	0	0	0
7.1.4. Jasa Penunjang Lainnya	8 08	844	883
7.2. Komunikasi	430	457	498
8. Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan	35.992	37.613	40.368
8.1. Bank	9.459	9.974	10.946
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1.457	1.521	1.591
8.3. Sewa Bangunan	23.885	24.870	26.503
8.4. Jasa Perusahaan	1.191	1.247	1.327
9. Jasa-Jasa	99.986	103.971	108.860
9.1. Pemerintah Umum	69.225	71.510	74.327
9.2. Swasta	30.761	32.461	34.532
9.2.1. Sosial Kemasyarakatan	10.260	10.800	11.620
9.2.2. Hiburan & Rekreasi	47	50	53
9.2.3. Perorangan dan Rumah Tangga	20.455	21.611	22.859
Produk Domestik Regional Bruto	**823.422**	**884.329**	**948.546**

Sumber : Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2004

Tabel 2.5.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Morowali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2002-2004 (%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004
1. Pertanian	59.37	59.97	60.04
1.1. Tanaman Bahan Makanan	9.69	9.05	8.50
1.2. Tanaman Perkebunan	29.72	31.14	31.98
1.3. Peternakan	2.40	2.23	2.08
1.4. Kehutanan	8.01	7.83	7.79
1.5. Perikanan	9.56	9.72	9.70
2. Penggalian	0.52	0.51	0.51
3. Industri	4.19	4.11	4.09
3.1. Makanan, Minuman dan Tembakau	0.94	0.92	0.92
3.2. Tekstil, Brg dari Kulit dan Alas Kaki	0.02	0.02	0.02
3.3. Kayu dan hasil hutan lainnya	3.00	2.94	2.93
3.4. Kertas dan Barang Cetakan	0.05	0.05	0.05
3.5. Pupuk Kimia dan Brg dari Karet	0,00	0,00	0,00
3.6. Semen & Barang Galian bukan logam	0.17	0.16	0.16
3.7. Alat angkutan, Mesin dan Peralatannya	0,01	0,01	0,01
3.8. Barang lainnya	0,00	0,00	0,00

4. Listrik dan Air Bersih	0.45	0.45	0.46
4.1. Listrik	0.40	0.40	0.41
4.2. Air Bersih	0.05	0.05	0.05
5. Bangunan	3,45	3.41	3.45
6. Perdaganan, Hotel dan Restoran	14.46	14.52	14.71
6.1. Perdagangan Besar &Eceran	13.75	13.80	13.98
6.2. Hotel	0.10	0.10	1.10
6.3. Restoran	0.61	0.61	0.63
7. Angkutan dan Komunikasi	1.05	1.02	1.00
7.1. Angkutan	1.00	0.97	0.95
7.1.1. Angkutan Jalan Raya	0.82	0.80	0.78
7.1.2. Angkutan Laut	0.08	0.08	0.08
7.1.3. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00
7.1.4. Jasa Penunjang Lainnya	0,10	0.10	0.09
7.2. Komunikasi	0.05	0.05	0.05
8. Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.37	4.25	4.26
8.1. Bank	1.15	1.13	1.15
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0.18	0.17	0.17
8.3. Sewa Bangunan	290	281	279
8.4. Jasa Perusahaan	0,14	0.14	0.14
9. Jasa-Jasa	12.14	11.76	11.48
9.1. Pemerintah Umum	8.41	8.09	7.84
9.2. Swasta	3.74	3.67	3.64
9.2.1. Sosial Kemasyarakatan	1.25	1.22	1.23
9.2.2. Hiburan dan Rekreasi	0,01	0,01	0,01
9.2.3. Perorangan dan R. Tangga	2.48	2.44	2.41
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2004

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupetn Morowali Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha pada tahun 2002-2004 mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Tabel 2.6.1
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali
Tahun 2002-2004

Tahun	**PDRB adh Berlaku** (Juta Rp)	**Perkembangan** (%)	**PDRB adh Konstan** (Juta Rp)	**Pertumbuhan Ekonomi** (%)
2002	949.424	-	823.422	-

2003	1.041.321	9,68	884.329	7,40
2004	1.167.923	12,16	948.546	7,26
Rata-rata		**4,77**		**7,25**

Sumber : PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Morowali, 2004

Pertumbuhan Riil Sektoral

Selama periode tahun 2002-2004, secara keseluruhan pertumbuhan sektoral perekonomian Kabupaten Morowali menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak diberlakukannya pemekaran Kabupaten Morowali terjadi peningkatan geliat ekonomi kabupaten yang positif sehingga mendorong aktifitas ekonomi kabupaten. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Morowali atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 menunjukkan bahwa seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Selama periode ini pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali terus mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2003 pertumbuhan PDRB Kabupaten Morowali sebesar 9,68 persen, kemudian meningkat pada Tahun 2004 menjadi 12,16 persen.

Gambaran tersebut menjelaskan bahwa daya tarik perekonomian Kabupaten Morowali relatif baik dalam menyerap aktifitas investasi. Oleh karena itu, momentum ini perlu terus dikembangkan dan dioptimalkan dengan mengembangkan strategi dan kebijakan daya saing investasi di Kabupaten Morowali agar memberikan dukungan yang optimal bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Morowali.

Tabel 2.7
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Morowali
Tahun 2002-2004 (%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004
1. Pertanian	59.37	59.97	60.04
2. Penggalian	0.52	0.51	0.51
3. Industri Pengolahan	4.19	4.11	4.09
4. Listrik dan Air Bersih	0.45	0.45	0.46
5. Bangunan	3,45	3.41	3.45
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14.46	14.52	14.71
7.Angkutan dan Komunikasi	1.05	1.02	1.00
8. Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan	4.37	4.25	4.26
9. Jasa-Jasa	12.14	11.76	11.48
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2004

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sektor penggalian. Pada Tahun 2002 hanya sebesar 0,52 persen dan menurun 0,51 persen pada tahun 2004. Sektor-sektor lainnya tidak mengalami peningkatan atau relatif stabil bahkan cenderung mengalami penurunan. Dari table dapat dilihat bahwa sektor pertanian yang pada tahun 2003 sebesar 59,97 persen pada tahun 2004 justru mengalami peningkatan menjadi 60,04 persen.

2.1.4 Sosial Budaya dan Politik

Kondisi sosial budaya dan politik tercermin pada beberapa variabel utama antara lain tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dinamika budaya, dan dinamika politik dan pemerintahan.

- ***Pendidikan***

Kondisi pelayanan pendidikan dapat dilihat dari sisi aksesibilitas dan kualitas pelayanan. Dari sisi aksesibilitas, rasio tingkat partisipasi sekolah menunjukkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, sedangkan rasio guru terhadap murid dan gedung sekolah terhadap murid menunjukkan kualiltas pelayanan pendidikan pada suatu daerah. Kondisi ini dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan.

Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) rasio guru terhadap jumlah murid menunjukkan adanya perbaikan. Pada tahun 2002 rasio guru terhadap murid adalah 17, yang berarti setiap satu orang guru menangani 17 murid. Pada tahun 2003 daya tampung per sekolah adalah 97 murid. Pada tahun 2004 mengalami penurunan, dimana rasio guru terhadap murid menjadi 17. Rasio guru terhadap murid terus memperlihatkan kondisi yang baik, pada tahun 2004 rasio guru terhadap murid adalah 8 jika dibandingkan pada tahun 2003 yang rasionya sebesar 5 . Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, rasio guru terhadap murid sebesar 14 pada tahun 2003 dan 15 pada tahun 2004. Sedangkan untuk rasio sekolah terhadap murid menunjukkan perbaikan, yaitu pada tahun 2003 sebesar 219 murid/sekolah menjadi 202 murid/sekolah.

Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA), rasio guru terhadap murid menunjukkan peningkatan, yaitu 14 pada tahun 2003 menjadi 15 pada tahun 2004. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah murid tidak diikuti oleh penambahan jumlah guru. Meskipun demikian rasio guru terhadap murid masih berada dalam kategori baik. Gambaran penjelasan

ini dapat dilihat juga pada rasio sekolah terhadap murid yang juga mengalami penurunan. Pada tahun 2002 setiap sekolah 192 setiap sekolah menampung sebanyak 192 murid/sekolah, pada tahun 2003 jumlah murid yang ditampung pada setiap sekolah meningkat 201 murid, namun dan pada tahun 2004 jumlah murid yang ditampung pada setiap sekolah menurun menjadi 194 murid/sekolah.

Permasalahan pelayanan pendidikan dalam jangka panjang, tidak hanya terkait dengan daya tampung sekolah tetapi juga berkaitan dengan penyediaan guru dan kualitas proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, agar kegiatan pelayanan pendidikan berjalan optimal maka diperlukan perhatian dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk meningkatkan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan sehingga dapat mendukung pelaksanaan sistem pendidikan berbasis kompetensi. Dalam jangka panjang, kualitas luaran pendidikan formal ini akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja berkulitas yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan investasi dan perekonomian daerah.

- ***Derajat Kesehatan***

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan tercermin pada kondisi derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Secara nasional tujuan pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk pencapaian Indonesia Sehat Tahun 2010. Dengan tujuan ini, maka pemerintah telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui

berbagai macam program dan kegiatan. Pada intinya, pemerintah berusaha mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan menjadi tujuan yang strategis, karena masyarakat yang sehat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin baik derajat kesehatan masyarakat, semakin baik pula tingkat kesejahteraannya. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat terkait dengan derajat kesehatan masyarakat dapat didekati dari berbagai pendekatan. Salah satu indikator nyata yang secara langsung dapat dilihat adalah ukuran kesehatan jasmani.

Secara kuantitatif, kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan rumah sakit dan tenaga kesehatan, terutama dokter. Pada Tahun 2004 jumlah tenaga dokter di Kabupaten Morowali sebanyak 20 orang, terdiri atas 14 dokter umum, dokter Spesialis 2 orang dan 4 dokter gigi. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Morowali pada Tahun 2004 sebanyak 166.477 jiwa, maka rasio dokter terhadap penduduk adalah sebesar 8324 orang. Angka ini mengindikasikan bahwa kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali masih sangat terbatas. Untuk ketersediaan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas, sampai dengan tahun 2004 di Kabupaten Morowali baru terdapat 1 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur 42 buah tempat tidur dan 98 unit puskesmas yang terdiri dari puskesmas inpres 13 unit, puskesmas non inpres 2 unit, puskesmas pembantu (pustu) 72 unit,

puskesmas kelilikg darat 3 unit, dan puskesmas keliling laut 9 unit. Dengan melihat rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk sebesar 3.964, mengindikasikan bahwa setiap satu tempat tidur akan digunakan untuk melayani 3.964 penduduk.

Secara kuantitatif tampak bahwa permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali terkait dengan keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang Pemerintah Kabupaten Morowali perlu meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan secara langsung derajat kesehatan masyarakat dan hal ini dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Morowali.

- ***Pola Budaya Masyarakat***

Penduduk Kabupaten Morowali merupakan multi etnis. Kondisi keragaman budaya ini membutuhkan perhatian dan strategi khusus bagi Pemerintah Kabupaten Morowali agar dapat dimanfaatkan sebagai potensi pembangunan bukan sebaliknya memunculkan potensi konflik horisontal. Beberapa etnis yang dikenal di Kabupaten Morowali meliputi Bungku, Mori, Bugis, Bajo, Menui, Wana, dan Toraja, ditambah etnis lainnya yang berasal dari eks transmigran seperti Jawa, Bali dan Lombok.

Keberadaan latar belakang suku, sosial budaya, dan agama yang beragam secara langsung akan mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Morowali. Dalam kaitan ini penting bagi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk mengembangkan situasi dan kondisi sosial yang aman dan nyaman sehingga keragaman kondisi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara positif dalam menunjang pelayanan kegiatan pembangunan di Kabupaten Morowali.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk membangun rasa kebersamaan sebagai masyrakat akan berpengaruh langsung terhadap kondisi keamanan dan kestabilan politik di Kabupaten Morowali. Dalam jangka panjang, kondisi keamanan dan kestabilan politik yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam menarik investasi untuk masuk ke Kabupaten Morowali. Dalam konteks nilai-nilai dan budaya masyarakat Kabupaten Morowali dikenal prinsip-prinsip *limbo linorodoku* yang berarti negeri yang kami rindukan dan *tepeasa moroso* yang berarti bersatu kita jalin kerjasama yang kuat. Dengan prinsip-prinsip ini pelaksanaan tata kekola pemerintahan yang baik diharpkan dapat dicapai secara lebih optimal.

2.1.5 Prasarana dan Sarana

a. Transportasi

Kelancaran transportasi memegang peranan penting dalam mewujudkan kondisi perekonomian yang diinginkan. Ketersediaan sarana transportasi berdampak positif terhadap ketersediaan barang

dan jasa sesuai dengan jumlah, kualitas dan waktu yang diinginkan. Bagi masyrakat yang memproduksi barang dan jasa dapat dengan mudah memperoleh bahan baku untuk memperlancar kegiatan produksinya apabila didukung oleh kelancaran arus transportasi. Selain itu mereka juga dapat memasarkan produksinya dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Kondisi seperti ini akan berimplikasi terhadap efektifitas dan efisiensi perekonomian masyarakat.

Panjang jalan dan kondisi jalan memegang peranan penting untuk mendukung kelancaran arus transportasi. Daerah-daerah yang terisolasi selama ini akan lebih banyak dijangkau apabila ruas jalan semakin panjang. Sedangkan kualitas jalan yang baik akan mempermudah arus transportasi sehingga waktu tempuh dapat dipersingkat dan kapasitas angkut dapat diperbesar.

Panjang jalan di Kabupaten Morowali saat ini telah mengalami kemajuan. Panjang jalan pada Tahun 2002 1.379,43 Km, meningkat terus selama periode Tahun 2003-2004 masing-masing menjadi 1.406,33 Km, 1.414,15 Km meliputi jalan negara, propinsi dan kabupaten, permasalahan terhadap prasarana jalan di Kabupaten Morowali adalah kondisi jalan rusak yang cukup besar. Dari total panjang jalan pada tahun 2004 1.414,15 Km, yang berada dalam kondisi baik hanya 614,21 Km dan sedang 247,71 Km, sedangkan kondisi rusak mencapai 245,07 Km dan rusak parah sepanjang 268,74 Km. Oleh karena itu, untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan prasarana transportasi darat perlu dilakukan perbaikan

infrastruktur jalan sehingga dapat meningkatkan efisiensi transportasi pada berbagai bidang kegiatan ekonomi. Ketersediaan prasarana jalan yang memadai sangat dibutuhkan mengingat perkembangan jumlah kendaraan dan kegiatan masyarakat yang terus meningkat di Kabupaten Morowali. Pada Tahun 2002 total kendaraan bermotor berjumlah 1003 dan pada tahun 2003, total kendaraan bermotor mencapai 1.354 buah, meningkat pada Tahun 2004 menjadi 1.959 buah. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan yang positif pada subsektor transportasi darat.

Peranan transportasi laut di Kabupaten Morowali sangat strategik mengingat dua wilayan kecamatan, yaitu Bungku Selatan dan Menui Kepulauan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut. Secara khusus kondisi Kecamatan Bungku Utara, meskipun terletak dalam satu daratan, hubungan transportasi ke ibukota kabupaten hanya dapat dilakukan melalui transportasi laut. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi laut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan pemasaran hasil-hasil produksi masyarakat dan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Transportasi udara, sebagai sarana pendukung aksesibitas dalam pengembangan berbagai sektor perlu mendapat perhatian terutama pembukaan lapangan terbang dan pengadaan sarana/prasarana.

b. Listrik dan Air Bersih

Ketersediaan energi listrik yang memadai akan mendukung berbagai aktifitas ekonomi dan aktifitas rumah tangga. Berbaai jenis industri kecl/rumah tangga memanfaatkan listrik sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan produk. Selain itu listrik juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Ketersediaan tenaga listrik di Kabupaten Morowali secara umum bersumber dari pasokan PT. PLN. Produksi listrik di Kabupaten Morowali terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2002 jumlah produksi listrik 7.733.786 kWh, dan pada tahun 2003 jumlah produksi listrik sebesar 7.747.680 kWh, meningkat menjadi sebesar 9.181.750 kWh pada Tahun 2004. Gambaran yang sama juga terjadi pada sisi daya terjual yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2002 jumlah penjualan daya listrik sebesar 5.291.549 kWh dan pada Tahun 2003 jumlah penjualan daya listrik sebesar 6.719.536 kWh, meningkat menjadi sebesar 8.326.766 kWh pada Tahun 2004. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan kebutuhan listrik di kabupaten ini terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan jumlah pelanggan yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2002 jumlah pelanggan listrik mencapai 7.579 pelanggan dan pada Tahun 2003, jumlah pelanggan listrik mencapai 7.940 pelanggan, meningkat pada Tahun 2004 menjadi sebesar 9.761 pelanggan. Namun jika dibandingkan dengan jumlah pelanggannya, maka produksi listrik PLN yang terjual pada Tahun 2004 sebesar 8.326.766 kWh hanya

mampu melayani konsumsi listrik sebesar 168.689kWh per tahun atau 49 kWh per bulan. Hal ini jelas menggambarkan bahwa kelangsungan pasokan listrik di Kabupaten Morowali memiliki keterbatasan dalam mendukung pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan perhotelan, serta jasa-jasa lainnya. Dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Morowali perlu melakukan pengembangan pemanfaatan energi alternatif untuk mendukung pengembangan aktifitas perekonomian dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Untuk kebutuhan air minum, secara umum sumber utamanya berasal dari PDAM. Konsumsi penggunaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran dan usaha di Kabupaten Morowali menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2002 jumlah produksi PDAM mencapai 407.080 m^3. Pada Tahun 2003 dan Tahun 2004 jumlah produksi PDAM meningkat menjadi 407.080 m^3, dan 463.083 m^3. Tingkat produksi yang disalurkan selama Tahun 2002-2004 masing-masing sebesar 2.592.000 m^3, 299.857 m^3 dan 387.372 m^3 sedangkan jumlah air yang terjual masing-masing sebesar 85.344 m^3, 190.135 m^3 dan 321.475 m^3. Selisih jumlah yang disalurkan dan produksi menunjukkan besaran tingkat kebocoran yang mencapai 2.247.456 m^3 (2002), 98.108 m^3 (2003) dan 66.085 m^3 (2004). Besarnya tingkat kebocoran ini menggambarkan kurang efektifnya kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Morowali sehingga menimbulkan

ketidakefisienan produksi dan distribusi. Untuk menunjang perkembangan kebutuhan penggunaan air bersih dan air minum di Kabupaten Morowali dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Morowali perlu merumuskan langkah-langkah stratejik dalam menjaga kelangsungan pasokan air bersih yang bersumber dari PDAM.

2.1.6 Pemerintahan

Dari sisi pemerintahan, diakui bahwa pemerintah kabupaten/kota, tak terkecuali Kabupaten Morowali, masih memiliki sejumlah kendala dan permasalahan dalam mengembangkan desemtralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas. Kendala dan permasalahan dimaksud setidaknya dapat diamati dari beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Secara umum, perangkat kelembagaan pemerintah Kabupaten Morowali dilihat dari aspek sumberdaya aparat, administrasi pemerintahan, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, relatif masih lemah. Keadaan tersebut tentu saja kurang menguntungkan bagi pelaksanaan kewenangan yang didesentralisasikan maupun pengembangan kapasitas daerah.

b. Aparat pemerintah daerah belum sepenuhnya sanggup untuk melakukan *mental shifting* dari budaya kerja berdasarkan petunjuk dan arahan (juklak dan juknis) ke budaya prakarsa, inisiatif, dan kraatifitas. Perubahan paradigma manajemen pemerintahan belum

sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami secara baik, sehingga sikap, perilaku, cara pandang aparat pemerintah belum mengalami banyak perubahan.

c. Masih rendahnya tanggung jawab kelembagaan dan individual (*institutionel and individual responsibility*) dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintah dan pembangunan.

d. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Kendala-kendala tersebut semakin nempak seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang menurut berbagai prasyarat dasar, seperti transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, birokrasi yang efisien, kompetensi aparat yang memadai, dan lain-lain.

e. Belum tersedianya sistem informasi sumberdaya aparat pemerintah daerah. Pada kenyataannya, sistem informasi tersebut penting untuk mengetahui peta kekuatan dan kelemahan sumberdaya aparat, kualifikasi dan kompetensi, sehingga akan memudahkan dalam melakukan restrukturisasi, manajemen, dan merencanakan pembiayaan pengembangan sumberdaya aparat.

f. Belum tertatanya pola hubungan antar organisasi pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah, yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Penataan pola hubungan dimaksud selanjutnya akan menciptakan efektifitas, efisiensi, dan relevansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

g. Belum memadainya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan (*public services*). Karena itu, setiap daerah diharapkan dapat merumuskan standar maupun strategi pelayanan umum. Di Kabupaten Morowali, hal ini nampaknya belum banyak dikembangkan, atau paling tidak belum diimplementasikan secara optimal oleh aparat pemerintah daerah.

h. Belum terciptanya proses pembelajaran (*learning process*) dalam organisasi birokrasi dan unsur-unsur masyarakat. Hal tersebut amat penting mengingat bahwa saat ini kita berada dalam sebuah era yang sama sekali masih baru, dimana paradigma, pendekatn, metode, dan cara pandang dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, mengalami pergeseran yang amat substantif.

i. Peran dan fungsi pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan dan dimantapkan seiring dengan semakin dinamisnya tuntutan pengayoman pemerintah dalam memfasilitsi kehidupan politik dan hukum daerah, menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk tertib hukum, serta menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Adanya sejumlah kelemahan tersebut telah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi relatif lemah, yang dapat diamati dari masih rendahnya kemampuan untuk memberikan pelayanan publik, birokrasi pemerintah yang masih lamban, belum transparan dan akuntabel dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan,

masih terbatasnya kemampuan memberikan advokasi dan fasilitas, dan lain-lain.

Pada dasarnya, pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk menjalankan sejumlah kewenangan yang disentralisasikan serta tanggung jawab untuk mengembangkan otonomi yang lebih luas.

2.1.7 Tata Ruang

Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Morowali pada dasarnya diarahkan untuk pengembangan potensi pertanian. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian yang dominan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Morowali masih bersumber dari tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Kecenderungan penurunan kontribusi tanaman pangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Morowali mengindikasikan perlunya upaya pemerintah Kabupaten Morowali untuk mendorong sub-sektor perikanan agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan 11 kecamatan yang berbatasan dengan pantai (dari 13 kecamatan) mempertegas kebutuhan pengembangan sub-sektor perikanan bagi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Morowali.

Dengan pengembangan secara terintegrasi antara sisi hulu dan hilir, baik untuk perikanan budidaya maupun perikanan tangkap akan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang yang dibutuhkan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali secara berkelanjutan.

Untuk mendukung perencanaan dan pengemabangan sub-sektor perikanan dalam jangka panjang, maka perlu bagi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk melakukan penataan kawasan pesisir secara lebih sistematis dengan melakukan penyusunan tata ruang kawasan pesisir Kabupaten Morowali sebagai bahan acuan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumberdaya perikanan dan kelauatan secara berkelanjutan.

2.1.8 Keuangan Daerah

Kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunannya akan sangat mempengaruhi kemampuan daerah sebagai daerah otonom. Berkaitan dengan hal ini, maka kapasitas fiskal Kabupaten Morowali akan sangat menentukan keberhasilannya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan publik dan pelayanan langsung ke masyarakat.

Untuk melihat kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Morowali, kita dapat mengevaluasi realisasi penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, dan secara lebih rinci dengan melihat struktur komponen penerimaannya. Secara umum kemandirian fiskal Kabupaten Morowali akan ditentukan oleh seberapa besar porsi-porsi PAD semakin kecil ketergantungan Pemerintah Kabupaten Morowali terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pada Tahun 2003 total pendapatan Kabupaten Morowali mencapai Rp 180.155.877 juta, sedangkan pada Tahun 2004 meningkat menjadi Rp 200.611.733 juta. Namun demikian, proporsi terbesar dari penerimaan tersebut bersumber dari dana perimbangan yang kecenderungannya justru menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten Morowali untuk membiayai kegiatan pembangunan masih sangat tergantung dan dipengaruhi oleh pembiayaan pemerintah pusat. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi kemampuan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk memberikan pelayanan publik dan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur publik dan perbaikan sistem pelayanan masyarakat pada semua sektor dan bidang pembangunan.

Di sisi lain, kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membiayai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Morowali masih sangat terbatas. Proporsi PAD Kabupaten Morowali terhadap total pendapatan masih sangat rendah. Pada Tahun 2002 hanya sebesar 1,83 persen atau sebesar Rp 27.181.50 juta dan pada tahun 2004 meningkat kecil menjadi sebear 1,92 persen atau Rp 3.856.498 juta. Komponen PAD terbesar pada tahun 2004 adalah retribusi daerah yang mencapai 30,62 persen atau Rp 1.180.700 juta, lain-lain PAD yang sah sebesar 1,38 persen atau sebesar Rp 2.051.348 juta, dan pajak daerah sebesar 16,13 persen atau Rp 621.949 juta.

Untuk tahun 2006, terjadi pergeseran dan proporsi kontribusi komponen PAD.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, tampak bahwa permasalahan bidang keuangan daerah jangka panjang adalah *fiscal capacity* dan *fiscal sustainability* dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Morowali. Agar dukungan PAD dapat lebih optimal, maka Pemerintah Kabupaten Morowali dapat mengembangkan berbagai inovasi pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan penerimaan PAD, secara khusus retribusi daerah.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

Pencapaian visi dan perwujudan misi Kabupaten Morowali sangat dipengaruhi oleh kecenderungan yang terjadi pada masa kini dan pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan prediksi terhadap kondisi umum daerah, sehingga dapat dilakukan strategi dan kebijakan yang bersifat proaktif dan antisipatif terhadap posisi pencapaian visi dan perwujudan misi Kabupaten Morowali.

Terdapat tiga variabel utama yang mendasar bagi pencapaian visi dan perwujudan misi Kabupaten Morowali yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan sektor pertanian sebagai basis agribisnis.

2.2.1 Jumlah Penduduk

Dengan menggunakan data jumlah penduduk Kabupaten Morowali Tahun 2002-2004 diperoleh prediksi jumlah penduduk sampai pada Tahun 2025.

Tabel 2.8.
Prediksi Jumlah Penduduk
Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk
2005	170.200
2006	178.328
2007	190.012
2008	193.786
2009	197.856
2010	202.011
2011	206.253
2012	210.584
2013	215.006
2014	219.521
2015	224.131
2016	228.838
2017	233.644
2018	238.550
2019	243.560
2020	248.675
2021	253.897
2022	259.229
2023	264.672
2024	270.231
2025	270.231

Sumber : Data Perhitungan

Tabel 2.8. menunjukkan bahwa dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 2,5% jumlah penduduk sama dengan periode pada Tahun 2003-2004, maka jumlah penduduk Kabupaten Morowali pada Tahun 2025 menunjukkan jumlah yang semakin meningkat yaitu sebesar 270.231 jiwa. Angka rata-rata pertumbuhan penduduk dirumuskan dengan total selisih jumlah penduduk selama 20 tahun dibahagi 20 tahun. Jumlah penduduk yang lebih banyak ini dapat diinterpretasikan dalam dua sisi. Pertama, dengan jumlah penduduk yang lebih besar maka ketersediaan sumberdaya manusia untuk kegiatan pembangunan menjadi lebih banyak, dengan syarat kualitas sumberdaya manusianya juga baik. Kedua, dengan jumlah penduduk yang lebih besar diperlukan jumlah makanan yang lebih banyak, lahan yang lebih luas untuk penyediaan perumahan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Keseluruhan keadaan ini, baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses pencapaian visi Kabupaten Morowali; sehingga diperlukan strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi dampak negatif dari jumlah penduduk yang lebih besar.

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali merupakan salah satu variabel stratejik yang akan mempengaruhi pencapaian visi Kabupaten Morowali. Dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2002-2004 prediksi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Morowali sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Prediksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Jutaan)
2005	1.058.412
2006	1.197.029
2007	1.394.560
2008	1.492.816
2009	1.615.227
2010	1.747.676
2011	1.890.985
2012	2.046.046
2013	2.213.821
2014	2.395.355
2015	2.591.774
2016	2.804.299
2017	3.034.252
2018	3.283.061
2019	3.552.271
2020	3.843.558
2021	4.158.729
2022	4.499.745
2023	4.868.724
2024	5.267.960
2025	5.699.933

Berdasarkan data Tabel 2.9. tampak bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali sampai dengan 2025 adalah positif. Hal ini menggambarkan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali pada masa datang mendukung untuk mewujudkan visi Kabupaten Morowali, khususnya apabila Pemerintah Kabupaten Morowali secara konsisten menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan investasi di kami. Dengan kebijakan-

kebijakan yang konsisten ini diharapkan daya saing investasi di Kabupaten Morowali dapat meningkat sehingga memberikan peluang sebagai wadah pembentukan dan percepatan kemandirian lokal yang dicita-citakan.

2.2.3 Pertumbuhan Sektor Pertanian

Kondisi pertumbuhan sektor pertanian pada masa datang secara langsung akan mempengaruhi kondisi masa depan Kabupaten Morowali. Hal ini disebabkan Kabupaten Morowali merupakan kabupaten dengan perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam, khususnya sektor pertanian. Dengan menggunakan data pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Morowali tahun 2002-2004 diperoleh prediksi pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Morowali sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.10

Tabel 2.10.
Prediksi Pertumbuhan Sektor Pertanian
Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025
(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2005	551.480
2006	600.087
2007	652.979
2008	706.523
2009	764.458
2010	827.144
2011	894.970
2012	968.357
2013	1.047.762
2014	1.133.679
2015	1.226.641

2016	1.327.225
2017	1.436.057
2018	1.553.814
2019	1.681.227
2020	1.819.088
2021	1.968.253
2022	2.129.649
2023	2.304.281
2024	2.493.232
2025	2.697.677

Berdasarkan kecenderungan data pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Morowali Tahun 2000-2004, prediksi pertumbuhan sektor pertanian sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan Kabupaten Morowali dengan basis sektor pertanian sangat dimungkinkan. Namun demikian, perlu diidentifikasi subsektor pertanian yang dapat dijadikan sebagai penggerak pertumbuhan sektor pertanian tersebut. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi saat ini, maka dapat diidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk mencapai visi Kabupaten Morowali.

1. Kondisi Internal

Kondisi lingkungan internal berkaitan dengan kecenderungan regional bahwa Kabupaten Morowali dengan potensi internal yang dimiliki sangat berpeluang untuk menjadi daerah yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan daerah-daerah *hinterlandnya* baik secara fungsional maupun secara hirarkhis, sehingga posisi Kabupaten

Morowali di masa depan semakin menjadi daerah yang memiliki daya tarik tersendiri, daya dukung untuk dapat melakukan kerjasama yang baik dalam rangka mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan.

Kemudian dari sisi kecenderungan lokal, Kabupaten Morowali dapat mencapai kemajuan yang signifikan dengan adanya kekuatan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam tata pemerintahan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memperkuat dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga dimasa depan Kabupaten Morowali tumbuh dan berkembang, mandiri dan sejajar dengan daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan kecenderungan regional dan lokal yang dimaksudkan di atas, maka Kabupaten Morowali di masa depan sangat memerlukan beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Proses pembangunan menghendaki adanya pemerataan, sehingga kesenjangan antara daerah dapat teratasi dengan baik.
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus diterjemahkan dalamartian luas, sehingga pemaknaan otonomi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi regional dan lokal yakni dengan melalui sinergitas dan interkoneksitas.
3. Ketersediaan sumberdaya sebagai faktor keunggulan daerah dimanfaatkan secara optimal, sehingga memberi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.

4. Pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan penurunan angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan kecenderungan tersebut di atas, pencapaian tujuan pembangunan hanya dapat dicapai jika kekuatan yang dimiliki Kabupaten Morowali dapat diarahkan sesuai dengan lingkungan strategis yang dimiliki terutama dari segi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya, kemudian dikembangkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

2. Kondisi Eksternal

Banyak hal yang patut dicermati lebih jauh sehubungan dengan kuatnya kecenderungan global, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pergeseran dinamika perkembangan lingkungan strategis, menuntut pentingnya penyesuaian terhadap perkembangan yang dihadapi berupa tantangan maupun peluang yang ditimbulkan.

Dalam kondisi yang dimaksudkan maka Kabupaten Morowali dimasa depan senantiasa menggali potensi dari keunggulan komparatif yang dimiliki untuk selanjutnya dikembangkan ke arah terciptanya keunggulan kompetitif, sehingga kecenderungan global dengan arus barang dan jasa bergerak tanpa batas justru memberi manfaat positif bagi perkembangan dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka paling tidak beberapa faktor yang perlu diperhatikan:

a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

b. Penguasaan informasi dan teknologi

c. Peningkatan kualitas produk unggulan

d. Peningkatan ketahanan ekonomi

e. Penguatan nilai-nilai agama

Lima faktor yang dimaksudkan di atas merupakan instrumen pembangunan yang dapat mengantisipasi kecenderungan global yang senantiasa menjadi agenda jangka panjang, sehingga dengan itu Kabupaten Morowali dapat memaknai perubahan dengan lingkungan strategis yang ada.